

<input type="radio"/> Senin	<input checked="" type="radio"/> Selasa	<input type="radio"/> Rabu	<input type="radio"/> Kamis	<input type="radio"/> Jumat	<input type="radio"/> Sabtu	<input type="radio"/> Minggu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<input type="radio"/> Jan	<input type="radio"/> Feb	<input type="radio"/> Mar	<input type="radio"/> Apr	<input type="radio"/> Mei	<input type="radio"/> Jun	<input type="radio"/> Jul	<input type="radio"/> Ags	<input checked="" type="radio"/> Sep	<input type="radio"/> Okt	<input type="radio"/> Nov	<input type="radio"/> Des				

## Banyak Pustakawan Tak Profesional

**DIPATI UKUR, (GM).-**

Banyak pustakawan (pengelola perpustakaan) yang tidak profesional karena tidak berasal dari pendidikan tinggi ilmu perpustakaan di perguruan tinggi. Hal itu diungkapkan Guru Besar Luar Biasa Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Prof. Dr. Sulisty Basuki, usai pembukaan Kongres Nasional Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Indonesia, di Gedung Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad), Jln. Dipati Ukur Bandung, Senin (17/9).

Menurut Sulisty, di Indonesia banyak perpustakaan menggunakan tenaga pustakawan yang tidak kompeten di bidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. "Akibatnya, profesi pustakawan di Indonesia dianggap tidak profesional sehingga kurang diminati masyarakat," ujarnya.

Dia menyebutkan, kondisi ini masih terjadi di Indonesia, terutama masih ada pustakawan fungsional yang tidak selalu berasal dari lulusan pendidikan tinggi. Bahkan hampir sebagian besar pustakawan di daerah, kepala perpustakaan selalu berasal dari pejabat dinas di lingkungan pemerintahan yang dirolling atau ditugaskan oleh kepala daerahnya.

"Misalnya, pejabat dari Dinas Perumahan atau Dinas Pemakaman yang diangkat menjadi kepala perpustakaan daerah kabupaten atau kota. Namun sebelumnya, mereka mendapat pelatihan singkat tentang perpustakaan," ujarnya.

Menurutnya, jika hanya mendapat pelatihan singkat tentang perpustakaan, bagaimana perpustakaan bisa ramai dan berjalan baik. Sulisty sangat yakin jika pengelola museum yang hanya mendapat pelatihan perpustakaan secara singkat tidak bisa mengembangkan perpustakaan.

"Perpustakaan akan terus sepi seperti kuburan, apabila tidak diserahkan pengelolaannya kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya," tandasnya.

Di Indonesia, ada dua jenis pustakawan, yakni pustakawan yang berasal dari lembaga pendidikan formal serta pustakawan lulusan lembaga kursus atau pelatihan yang digelar oleh Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Perpustakaan Nasional RI.

Namun dalam masalah pekerjaan, para pustakawan lulusan perguruan tinggi lebih banyak bekerja di perpustakaan perguruan tinggi, khusus, dan sekolah. Sementara pustakawan lulusan pusdiklat perpustakaan lebih

banyak bekerja di perpustakaan umum, perpustakaan badan, perpustakaan daerah maupun kabupaten/kota.

Kondisi pustakawan ini diperparah dengan dikeluarkannya standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang perpustakaan sementara dan tidak ada ditetapkan pengawasnya. Selain itu, masih terbatasnya pengajar yang bergelar doktor, nama lembaga yang masih berbeda-beda, dan belum ada kurikulum inti yang berlaku secara nasional.

"Untuk itu dengan adanya asosiasi ini, kami berharap bisa menemukan jalan keluar berbagai masalah di bidang perpustakaan," katanya.

Padahal, di Indonesia pendidikan perpustakaan berkembang cukup pesat, terbukti dari banyaknya penyelenggara pendidikan tersebut yang tersebar di 18 perguruan tinggi. Mereka menawarkan S1 perpustakaan, selain 25 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program D3, satu perguruan tinggi membuka D2, universitas terbuka (UT), dan 5 perguruan tinggi yang membuka pascasarjana.

"Namun sayang, lulusan dari pendidikan formal tentang perpustakaan ini masih dipandang sebelah mata oleh pengelola Perpustakaan Nasional," ujarnya. **(B.81)\*\***